Judul : Perampingan Tak Akan Efektif â€“ Kinerja DPR Jeblok Karena Anggotanya Sering Kerja Rangkap
Tanggal : Selasa, 26 Februari 2013
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

FEBRUARI 2013

M	S	S	R	K	J	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28		

KLIPING BERITA PERISTIWA DPR RI

Bisnis Indonesia	Indo Pos	Jakarta Post	Kompas
Koran Tempo	Media Indonesia	Pelita	Rakyat Merdeka √
Republika	Seputar Indonesia	Suara Karya	Suara Pembaruan

Hal: 6

Perampingan Tak Akan Efektif

Kinerja DPR Jeblok Karena Anggotanya Sering Kerja Rangkap



Ronald Rofiandri

PERNYATAAN Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y Thohari soal perampingan jumlah anggota dewan terus menuai kritikan. Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Rofiandri menilai, kurang berkualitasnya kinerja anggota dewan karena kerja rangkap.

"Sebagian besar anggota DPR *double job* di berbagai alat kelengkapan DPR, baik yang permanen maupun ad hoc. Rangkap ini menyulitkan anggota dewan bekerja optimal. Mereka makin kerepotan karena manajemen rapat di DPR belum responsif terhadap dinamika DPR," katanya.

Menurut Ronald, jumlah anggota dewan tidak akan mempengaruhi kualitas kinerjanya di parlemen jika disiapkan calon anggota dewan yang baik, mulai dari rekrutmen hingga persaingan sehat.

"Agar setiap anggota DPR mampu menunjukkan kinerja yang maksimal dan tidak terperangkap pada beban kerja yang tidak realistis," katanya.

Selain itu, kata dia, optimalisasi kinerja DPR juga bisa melalui revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Pengetatan syarat pembentukan fraksi dan desain prolegnas yang harus dirombak ulang.

"Mau anggota DPR 200, 300 orang, atau masih bertahan seperti sekarang, kalau desain prolegnasnya nggak berubah, ya sama saja, kinerjanya bakal payah terus," lanjut Ronald.

Dalam kesempatan itu, dia juga menyinggung soal tenaga ahli. Idealnya, lanjut dia setiap anggota DPR mempunyai 4-5 orang tenaga ahli.

Angka tersebut, kata dia, berdasarkan masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan hasil riset Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR bersama sejumlah perguruan tinggi.

Sebelumnya, Hajrianto mengusulkan agar jumlah anggota DPR pada periode yang akan datang dirampingkan. Alasannya, jumlah kursi DPR yang mencapai 560 orang terlalu gemuk dan memudahkan seseorang untuk duduk di Senayan.

Padahal, kata dia, jumlah yang cukup besar tersebut tidak sebanding dengan kinerja anggota dewan selama ini. Dalam artian, kata dia, kuantitas yang ada di DPR tidak sebanding dengan kualitas yang dihasilkannya.

"Berapa jumlahnya? Silakan lihat jumlah anggota dewan yang hadir saat sidang-sidang paripurna. Mereka yang hadir, jumlahnya hampir setengah dari daftar seluruh anggota dewan," ujarnya. ■ QAR

Perpustakaan DPR RI